

RINGKASAN

WINDA NUR FARIDA KARTIKA PUTERI. Sistem Pembayaran Pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor (*Payment System of the BPHTB tax at Bogor Regional Income Agency*). Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atau perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah, menguraikan cara perhitungan pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah, menguraikan pihak dan dokumen yang terkait dalam pembayaran pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah, menguraikan prosedur dan flowchart pengurusan akte pemindahan hak atas tanah dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah, menguraikan prosedur dan *flowchart* sistem pembayaran dan verifikasi surat setor pajak daerah BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah, menguraikan pengendalian internal pada Badan Pendapatan Daerah.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan merupakan salah satu pendapatan daerah. Dalam pemungutannya menggunakan sistem *Self Assessmet System*, wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung dan menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dalam memastikan kelengkapan dan kebenaran suatu laporan keuangan maupun dokumen dibutuhkan sistem pembayaran dan verifikasi. Sistem pembayaran yang sangat berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain, sama halnya dengan sistem verifikasi yaitu pada Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mencegah terjadinya salah saji yang material baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak sengaja. Dalam hal ini verifikator sebagai petugas verifikasi yang bertugas untuk memeriksa apakah laporan atau suatu berkas tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

Kata kunci: Pajak BPHTB, Sistem Pembayaran, Verifikasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.